



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN PPUU DPD RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

TANGGAL 16 JANUARI 2020

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Kamis, 16 Januari 2020.
P u k u l	: 16.13 WIB s/d 17.40 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Pansus B, Gd. Nusantara II Lt. 3.
A c a r a	: Pembahasan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sesuai amanat Keputusan Rapat Bamus Tanggal 16 Desember 2019.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan	: - Rieke Diah Pitaloka, M.Hum - Willy Aditya - Drs. Ibnu Multazam - Ach. Baidowi, S.Sos.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 60 orang, izin 19 orang dari 80 orang Anggota. - Menteri Hukum dan Ham RI beserta jajaran; - Pimpinan Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD RI beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham dan PPUU DPD RI dalam rangka pembahasan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. dibuka pada pukul 16.13 WIB dan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Ham dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka penyusunan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 menyetujui untuk menyepakati :

Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU sebagaimana Draft B dengan menambah RUU tentang Keamanan Laut dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan catatan :

- a. 2 (dua) RUU usulan Komisi X yang semula :
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Menjadi

- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan
 - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diganti dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang semula usulan Pemerintah menjadi usulan DPR/Badan Legislasi.
 - c. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang semula usulan DPR/Komisi X menjadi usulan dari Pemerintah.
 - d. RUU tentang Keamanan Laut ditambahkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 usulan dari Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham dan PPUU DPD RI dalam rangka pembahasan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 ditutup pukul 17.40 WIB.

Jakarta, 16 Januari 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001